

## INTERVIEW GUIDE

Pertanyaan kepada kepala bidang Pengendalian Penduduk (DALDUK) dan kepala sub bidang Kerjasama Pendidikan Kependudukan, sebagai berikut :

1. Mengapa program Sekolah Siaga Kependudukan ini dibentuk?
2. Mengapa menasar sekolah dari SD hingga SMA?
3. Bagaimana strategi BKKBN DIY dalam mensosialisasikan program Sekolah Siaga Kependudukan?
4. Bagaimana perencanaan kegiatan sosialisasi program SSK?
5. Pesan atau informasi apa yang disampaikan pada saat sosialisasi program SSK?
6. Siapa yang menjadi komunikator pada saat mensosialisasikan program SSK?
7. Siapa yang menjadi komunikator dalam kegiatan *workshop* pendidikan kependudukan dan apa saja pesan yang disampaikan?
8. Pesan apa yang disampaikan dalam kegiatan audiensi kepada kepala sekolah?
9. Apakah media yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi program SSK?
10. Mengapa sosialisasi program SSK lebih mengutamakan menggunakan komunikasi tatap muka?
11. Adakah biaya yang ditanggung sekolah di dalam menerapkan program SSK?
12. Siapakah mitra kerjasama BKKBN DIY dalam melaksanakan program SSK?
13. Kebijakan apa yang mendukung adanya program SSK?
14. Bagaimana cara BKKBN memonitoring dan mengevaluasi program SSK yang sudah dicanangkan di sekolah?

Pertanyaan kepada pihak sekolah yang berpartisipasi dalam program Sekolah Siaga Kependudukan, sebagai berikut :

1. Pesan atau informasi apa yang pihak sekolah dapatkan dari sosialisasi program SSK?
2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai sosialisasi program Sekolah Siaga Kependudukan yang telah dilakukan BKKBN DIY dalam menginformasikan program ini?
3. Siapa saja yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam menerapkan program SSK?
4. Mengapa sekolah bersedia menerapkan program Sekolah Siaga Kependudukan?

## Transkrip Wawancara

**Informan : Kepala Bidang Pengendalian Kependudukan BKKBN DIY,  
Witriastuti Susani Anggraeni, S.E., M.M. (16 April 2019, 15 Mei 2019, dan 26  
Juni 2019)**

### **15. Mengapa program Sekolah Siaga Kependudukan ini dibentuk?**

“Latar belakang dibentuknya Sekolah Siaga Kependudukan karena Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan menjadi model pembangunan ataupun aset, sebaliknya apabila generasi muda yang merupakan sasaran dari program ini yaitu remaja tidak memiliki kualitas yang baik maka akan menjadi beban negara. Hal ini juga didorong oleh data-data yang menunjukkan jumlah penduduk, angka kelahiran total nasional, laju pertumbuhan penduduk, tingkat kemiskinan, perkawinan usia anak, dan rata-rata lama sekolah di Indonesia.

Di DIY sendiri dengan jumlah penduduk 3,8 juta jiwa masih memiliki permasalahan perkawinan usia anak dan kasus stunting. Kasus stunting di Yogyakarta terdapat di dua kabupaten, yaitu Bantul dan Kulon Progo. Selain itu Yogyakarta juga memiliki permasalahan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan yang tinggi meskipun indeks kebahagiaannya juga tinggi. Melalui program Sekolah Siaga Kependudukan isu-isu tersebut diharapkan dapat dimasukkan atau diintegrasikan oleh para guru ke dalam mata pelajaran dan tersampaikan kepada peserta didik sehingga membangun kepedulian dan diterapkan dalam kehidupan mereka.”

### **16. Mengapa menyasar sekolah dari SD hingga SMA?**

“Sekolah Siaga Kependudukan merupakan jalur formal dari pendidikan kependudukan yang menyasar sekolah tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tentunya materi pembelajaran yang diberikan disesuaikan dengan usia dan tingkat sekolahnya. Upaya ini dilakukan dengan harapan wawasan kependudukan dapat sampai kepada generasi muda sedini mungkin.”

### **17. Bagaimana strategi BKKBN DIY dalam mensosialisasikan program Sekolah Siaga Kependudukan?**

“Program SSK dipromosikan secara bertahap. Sehingga bagaimana SSK ini bisa diterima kita siapkan modul terlebih dahulu sebagai alat penunjang. Kita siapkan materi, panduan dan petunjuk teknis. Tahun 2016 itu ada penyusunan modul pendidikan kependudukan yang melibatkan sekolah baik SMA maupun SMP berbekal buku modul yang sudah dibuat BKKBN Pusat.”

“BKKBN DIY mengenalkan program SSK ini melalui pertemuan diantaranya diadakan *workshop* terlebih dahulu untuk menyampaikan dan memaparkan informasi atau sosialisasi tentang program SSK. Dari sanalah, mungkin pihak sekolah ada minat untuk menerapkan sekolah siaga kependudukan. Setelah itu dilakukan audiensi dengan kepala sekolah untuk melihat minat sekolah apakah benar-benar mau melanjutkan program ini kedepannya. Lalu jika kepala sekolah setuju untuk menerapkan program SSK kemudian selanjutnya diadakan juga sosialisasi kepada para guru dan peserta didik.”

**18. Bagaimana perencanaan kegiatan sosialisasi program SSK?**

“Kita ada pemetaan sekolah-sekolah yang berpotensi menjadi SSK kemudian ditindaklanjuti dengan sosialisasi. Potensi sekolah selain adanya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), karena juga adanya akreditasi perpustakaan sekolah. Selain itu juga ada potensi siswa sekolah yang pernah mengikuti lomba-lomba pidato kependudukan atau lomba karya tulis ilmiah kependudukan yang menunjukkan adanya bibit-bibit yang tertarik dengan isu-isu kependudukan. Kemudian juga ada siswa yang menjadi duta GenRe. Setelah dapat datanya direkap lalu diajukan ke Dinas DIKPORA karena dari BKKBN tidak bisa serta merta mengundang sekolah dalam kegiatan sosialisasi, sehingga dari DISDIKPORA yang mengundang.”

**19. Pesan atau informasi apa yang disampaikan pada saat sosialisasi program SSK?**

“Tujuan program ini diharapkan dapat membangun sumber daya manusia yang berkualitas, dengan SDM yang berkualitas tentu saja hasil di kemudian hari yang didapatkan akan positif. Diharapkan dengan adanya program SSK ini peserta didik mempunyai kegiatan yang positif dalam bentuk seni, tulisan, atau kegiatan apapun yang dapat meningkatkan kreatifitas siswa. Selain itu juga melatih peserta didik untuk berorganisasi melalui pengelolaan pojok kependudukan yang dibentuk dengan SK dari kepala sekolah.”

**20. Siapa yang menjadi komunikator pada saat mensosialisasikan program SSK?**

“Komunikator dalam kegiatan sosialisasi yaitu dari Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan program. Selain itu juga dari BKKBN Pusat, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.”

**21. Siapa yang menjadi komunikator dalam kegiatan *workshop* pendidikan kependudukan dan apa saja pesan yang disampaikan?**

“Narasumber selain dari BKKBN yaitu DISDIKPORA karena dengan adanya program ini mereka mempunyai suatu kebijakan tentang pentingnya materi kependudukan yang sasarannya kepada generasi muda. Kemudian ada juga narasumber yang berbicara tentang pentingnya isu kependudukan dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM. Di sana digambarkan bahwa laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat mengalami percepatan dalam kurun waktu yang singkat. Sehingga perlu untuk melakukan pengendalian jumlah penduduk.”

**22. Pesan apa yang disampaikan dalam kegiatan audiensi kepada kepala sekolah?**

“Dilakukan audiensi dengan kepala sekolah untuk melihat minat sekolah apakah benar-benar mau melanjutkan program ini kedepannya. Disampaikan tahap-tahap pembentukan SSK. Yang pertama sekolah itu mempersiapkan terkait siapa

pengelolanya, kemudian tempat yang akan dijadikan pojok kependudukan, kemudian kapan diberikan sosialisasi kepada guru maupun siswa.”

**23. Mengapa sosialisasi program SSK lebih mengutamakan menggunakan komunikasi tatap muka?**

“Sebenarnya semua cara itu kita tempuh. Tapi mungkin minat membaca atau membuka *web* mungkin belum terlalu gemar. Jadi di *website* melalui CIS tetap ada dan itu juga *paperless*, tinggal dibuka tapi tidak semua orang punya minat untuk membuka. Selain itu kita juga upayakan dalam bentuk cetak berupa buku. Kita tatap muka sambil mencoba apakah yang kita ajak komunikasi paham, yang kedua kita memanfaatkan tatap muka untuk *sharing* terkait isu-isu kependudukan. Jadi komunikasi tatap muka itu kita anggap banyak manfaatnya dan efektif, selain bisa tahu apakah yang diajak komunikasi paham dengan informasi yang kita sampaikan dan juga kita mendapat masukan. Walaupun frekuensinya kita sadari masih rendah karena setiap kegiatan membutuhkan anggaran atau dana.”

**24. Apakah media yang digunakan dalam mensosialisasikan program SSK?**

“Ada buku petunjuk teknis pengelolaan dan penerapan pendidikan kependudukan jalur formal yang bisa menambah wawasan guru, juga *website* CIS yang *paperless* jadi *soft file* dari buku-buku ada di situ.”

**25. Adakah biaya yang ditanggung sekolah di dalam menerapkan program SSK?**

“BKKBN dalam hal ini sebagai penyelenggara program hanya memfasilitasi secukupnya seperti menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan menyediakan buku-buku yang terkait dengan kependudukan di pojok kependudukan. Dengan adanya perjanjian kerjasama antara BKKBN dengan sekolah, maka sekolah telah berkomitmen untuk menerapkan program SSK ini di sekolahnya secara berkelanjutan. BKKBN tidak meminta atau menuntut sekolah untuk mengadakan kegiatan khusus yang berhubungan dengan program Sekolah Siaga Kependudukan. Tetapi sekolah dapat menyisipkan atau mengkolaborasikan kegiatan-kegiatan di sekolah dengan program SSK selain integrasi materi kependudukan ke dalam mata pelajaran dan pojok kependudukan.. Sehingga adanya biaya yang dikeluarkan tergantung dari kreatifitas sekolah masing-masing.”

**26. Siapakah mitra kerjasama BKKBN DIY dalam melaksanakan program SSK?**

“OPD KB Kabupaten/kota, OPD KB Provinsi, Disdikpora, Kementerian Agama.”

**27. Kebijakan apa yang mendukung adanya program SSK?**

“Dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 pasal 11 tentang sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pemerintah menetapkan program dan kegiatan penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk salah satunya

melalui kerjasama pendidikan kependudukan. Dan untuk mendukung *output* meminimalisir perkawinan usia anak ada UUD Nomor 52 tahun 2009 pasal 21 tentang kebijakan keluarga berencana usia ideal perkawinan di mana perempuan berumur 20 tahun dan laki-laki berumur 25 tahun.

**28. Bagaimana cara BKKBN memonitoring dan mengevaluasi program SSK?**

“Kita ada monev setiap tahun, harus dilaporkan ke pusat. Kita sampaikan hasil berupa kapan dibentuk SSK di sekolah, apa yang sudah dilakukan, progresnya seperti apa. Untuk sekolah yang bersangkutan juga ada, dengan melihat progress di sekolah seperti apa sebelum membuat laporan ke pusat.”

“Untuk internal kita setelah melaksanakan kegiatan, saya melakukan koordinasi dengan sub bidang kerjasama pendidikan kependudukan kemudian bersurat untuk melaporkan kegiatan yang sudah dilakukan.”

“Kita belum terlalu terapkan monev dengan instrumen penilaian, karena namanya program baru dan masih tahap awal. Tentu saja nanti ada monev tapi sifatnya lebih seperti pendampingan. Misalnya seperti mengkomunikasikan dengan sekolah apa yang kurang dalam pelaksanaan program, walaupun nanti ada kekurangan akan dilakukan upaya.”

## Transkrip Wawancara

**Informan : Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN DIY, Yusuf Prasetyo, S.Psi., M.Sc (16 April 2019 dan 26 Juni 2019)**

**1. Bagaimana strategi BKKBN DIY dalam mensosialisasikan program Sekolah Siaga Kependudukan?**

“*Workshop* kepada kepala-kepala sekolah, lalu audiensi ke kepala sekolah di sekolah, kemudian kalau kepala sekolah menyetujui untuk menerapkan SSK baru dilakukan sosialisasi di lingkungan sekolah kepada warga sekolah.”

**2. Mengapa menasar sekolah dari SD hingga SMA?**

“Sebenarnya kan penduduk itu bisa menjadi aset bisa menjadi beban. Bagaimana kedepannya seharusnya agar generasi selanjutnya menjadi aset, sedini mungkin kita kenalkan dengan masalah-masalah kependudukan, bagaimana mereka menyiapkan masa depan mereka, bagaimana dia mampu mengenali masalah kependudukan di lingkungannya.”

**3. Pesan atau informasi apa yang disampaikan pada saat sosialisasi program SSK?**

“Yang jelas sosialisasi berisi informasi tentang kependudukan itu sendiri, paling tidak kita memberikan pandangan kepada masyarakat perkembangan kependudukan saat ini, isu-isu kependudukan apa yang menjadi tren saat ini sehingga masyarakat tahu dan harapannya nanti bisa peduli kepada situasi kependudukan saat ini. Dari awal kami sampaikan Sekolah Siaga Kependudukan tujuan utamanya, setelah itu kita tawarkan sekolah mau apa tidak. Kalau sekolah bersedia berarti bukan hanya program dari BKKBN, tetapi sekolah bertanggungjawab untuk menjalankan program di sekolahnya.”

**4. Siapa yang menjadi komunikator pada saat mensosialisasikan program SSK?**

“Sebenarnya dari pihak BKKBN sendiri ada, lalu juga Pak Andar sebagai kepala sekolah yang sudah menerapkan program SSK di sekolahnya.”

**5. Pesan apa yang disampaikan dalam kegiatan audiensi kepada kepala sekolah?**

“Audiensi kepada kepala sekolah kita tawarkan sekolah mau apa tidak menerapkan program Sekolah Siaga Kependudukan. Kalau sekolah bersedia berarti bukan hanya program dari BKKBN, tetapi sekolah bertanggungjawab untuk menjalankan program di sekolahnya.”

**6. Adakah media lain yang digunakan dalam mensosialisasikan program SSK?**

“Media yang digunakan yaitu melalui *website* [cis.bkkbn.go.id/dalduk](http://cis.bkkbn.go.id/dalduk) yang di dalamnya disediakan materi-materi maupun modul dan artikel kependudukan jalur formal.”

**7. Mengapa sosialisasi program SSK lebih mengutamakan menggunakan komunikasi tatap muka?**

“Kalau untuk *website* kita ada melalui <https://cis.bkkbn.go.id/dalduk/>. Tapi memang untuk tatap muka lebih intens dilakukan untuk memudahkan pemahaman. Karena dengan tatap muka ada komunikasi dua arah seperti *sharing* dengan memberi informasi yang diketahui tentang isu kependudukan yang ada. *Website* BKKBN DIY tentang kependudukan juga ada, tapi lebih lengkap di CIS.”

**8. Adakah biaya yang ditanggung sekolah dalam menerapkan program SSK?**

“Dari sekolah kalau untuk berapanya sendiri kami tidak tahu, tetapi kegiatan-kegiatan terus berjalan seperti lomba-lomba yang diadakan di Bokpri 1 tentang puisi kependudukan, pekan kependudukan juga ada. Lalu SMA 2 Wonosari ada juga lomba yel-yel kependudukan. Di SMA 1 Banguntapan juga membuka stand pojok kependudukan saat pameran yang tentunya ada pengeluaran biaya di situ.”

**9. Siapakah mitra kerjasama BKKBN DIY dalam melaksanakan program SSK?**

“Dinas Pendidikan Provinsi, lalu Kementerian Agama, lalu OPD KB Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Juga OPD KB Provinsi (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk).”

**10. Bagaimana cara BKKBN memonitoring dan mengevaluasi program SSK?**

“Evaluasi dilakukan oleh BKKBN Pusat dengan membawa instrument penilaiannya. Wawancara dilakukan di Dinas Pendidikan, lalu OPD KB, lalu di sekolah yang menerapkan SSK.”

## Transkrip Wawancara

**Informan : Kepala SMA Bokpri 1 Yogyakarta, Drs. Andar Rujito,  
(29 April 2019)**

- 5. Pesan atau informasi apa yang pihak sekolah terima dari sosialisasi program SSK?**  
“Pentingnya isu-isu kependudukan diketahui bapak ibu guru untuk disampaikan kepada peserta didik”
- 6. Bagaimana tanggapan bapak mengenai sosialisasi program Sekolah Siaga Kependudukan yang telah dilakukan BKKBN DIY dalam menginformasikan program ini?**  
“BKKBN itu kan sering mengadakan kegiatan-kegiatan, beberapa guru kami libatkan untuk mendengarkan informasi berkaitan dengan kependudukan. Sebenarnya sosialisasi secara khusus ke sini tidak ada, tetapi hanya melalui perbincangan kami dengan BKKBN”
- 7. Mengapa sekolah mau berpartisipasi untuk menerapkan program Sekolah Siaga Kependudukan?**  
“Saya terlibat menyusun modul yang nantinya menjadi materi buku guru maupun buku siswa. Dari situ kemudian saya menganggap ini sangat bagus sekali. Semakin saya memahami, semakin saya sangat meyakini bahwa memang materi ini sangat penting disampaikan kepada peserta didik khususnya SMP maupun SMA. Bersama dengan itu ternyata BKKBN juga punya program untuk mendirikan atau mengadakan Sekolah Siaga Kependudukan.”
- 8. Siapa saja yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam menerapkan program SSK?**  
“Tentu pertama kali kepala sekolah, dibantu dengan wakil kepala sekolah khususnya bidang kurikulum.”

## Transkrip Wawancara

**Informan : Guru Geografi SMAN 1 Banguntapan Bantul, Drs. Sutianah  
M.Pd. (29 April 2019)**

**1. Pesan atau informasi apa yang pihak sekolah terima dari sosialisasi program SSK?**

“Ya terutama melalui lembaga pendidikan ini diharapkan membantu untuk menyampaikan kepentingan pemerintah yang secara umum dari pemerintah tapi secara khusus lewat BKKBN untuk bisa menggulirkan wacana kependudukan yang semakin hari semakin menimbulkan masalah supaya anak memahami. Nanti kalau memahami bisa menerapkan ke kesehariannya. Misalnya tentang salam GenRe yang mengatakan tidak untuk NAPZA, untuk seks pra-nikah, sampai sekarang memang itu permasalahan di kalangan remaja. Sehingga dengan kita jadi SSK dan kita teruskan ke siswa harapannya siswa jadi tahu dan menerapkan. Kalau menerapkan kan otomatis kan permasalahan kependudukan seperti ledakan penduduk, maraknya narkoba, seks bebas harapannya bisa dibenahi. Saat audiensi ke kepala sekolah maksud BKKBN menawarkan ke sekolah mau tidak untuk menjadi sekolah siaga kependudukan, sanggup atau tidak menjadi sekolah siaga kependudukan.”

**2. Bagaimana tanggapan ibu mengenai sosialisasi program Sekolah Siaga Kependudukan yang telah dilakukan BKKBN DIY dalam menginformasikan program ini?**

“Dengan adanya sosialisasi hingga audiensi ke sekolah itu menunjukkan adanya keseriusan untuk kerjasama antara BKKBN dengan sekolah yang sama-sama aktif dalam mencapai tujuan membentuk SSK di sekolah.”

**3. Mengapa sekolah mau berpartisipasi untuk menerapkan program Sekolah Siaga Kependudukan?**

“Saya merasa masalah kependudukan itu perlu dipahami oleh siswa agar nanti materi ini diintegrasikan ke mapel, kalau anak paham kan mereka punya perilaku-perilaku yang mendukung pemerintah untuk mengatasi permasalahan kependudukan. Jadi menurut saya itu perlu. Makanya ketika ditawarkan menjadi percontohan untuk bantu sekolah bersedia.”

**4. Siapa saja yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam menerapkan program SSK?**

“Terutama kepala sekolah, kemudian humas, kesiswaan, dan guru Bimbingan Konseling.”

## Transkrip Wawancara

**Informan : Kepala SMAN 2 Wonosari Gunung Kidul, Sumardi, S.Pd., M.Pd.  
(2 Mei 2019)**

**1. Pesan atau informasi apa yang pihak sekolah terima dari sosialisasi program SSK?**

“Jadi ada beberapa hal terutama yang terkait dengan muatan pembelajaran. Tentunya bagaimana dengan SSK ini bukan menjadikan mata pelajaran baru di sekolah tetapi ini adalah ketika ada pokok-pokok bahasan yang bisa dimasukkan disana maka guru bisa menuangkan ke dalam RPP kemudian di dari RPP tadi bisa diimplementasikan ke dalam pembelajaran sehingga tidak harus dipaksakan kalau memang tidak ada.”

**2. Bagaimana tanggapan bapak mengenai sosialisasi program Sekolah Siaga Kependudukan yang telah dilakukan BKKBN DIY dalam menginformasikan program ini?**

“Karena program Sekolah Siaga Kependudukan baru bagi kami, sehingga kami ingin tahu apa program Sekolah Siaga Kependudukan, kemudian ke depannya harusnya seperti apa. Setelah mendapatkan sosialisasi ternyata program Sekolah Siaga Kependudukan yang terdapat pojok kependudukan di dalamnya *in line* atau sejalan dengan program pembelajaran yang ada di SMA 2 Wonosari khususnya program sekolah sebagai sekolah literasi.”

**3. Mengapa sekolah mau berpartisipasi untuk menerapkan program Sekolah Siaga Kependudukan?**

“Salah satu unggulan di SMA 2 Wonosari adalah Sekolah Literasi. Dan literasi ini merupakan pengembangan dari program perpustakaan. Sekolah kita terkait dengan perpustakaan kita kembangkan seoptimal mungkin. Satu diantara program perpustakaan yang nampaknya perlu diperlukan strategi adalah terkait dengan kerjasama. Kita ingin kerjasama dengan berbagai lintas, baik dunia pendidikan maupun lintas yang lain. Satu diantaranya dengan kependudukan karena program SSK nampaknya nyambung dengan program perpustakaan.”

**4. Siapa saja yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam menerapkan program SSK?**

“Jadi ketika ada penawaran, kami melibatkan wakil kepala sekolah, kepala TU, dan juga melibatkan beberapa guru”

## Transkrip Wawancara

**Informan : Guru BK SMPN 1 Seyegan Sleman Wahyu Rahmawati, S.Pd.  
(8 Mei 2019)**

- 1. Pesan atau informasi apa yang pihak sekolah terima dari sosialisasi program SSK?**  
“Apa itu Sekolah Siaga Kependudukan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita siapkan”
  
- 2. Bagaimana tanggapan ibu mengenai sosialisasi program Sekolah Siaga Kependudukan yang telah dilakukan BKKBN DIY dalam menginformasikan program ini?**  
“Dari sosialisasi yang di lakukan BKKBN DIY kami jadi mengerti maksud dari Sekolah Siaga Kependudukan dan supaya anak mengerti serta sadar tentang kependudukan. Karena masalah kependudukan itu sebenarnya luas dan penting untuk dipahami oleh anak.”
  
- 3. Mengapa sekolah mau berpartisipasi untuk menerapkan program Sekolah Siaga Kependudukan?**  
“Menurut saya kenapa kemudian kita mau karena memang banyak manfaatnya. Kita bisa memberikan edukasi ke anak, ke orangtua. Taruhlah yang *simple*, anak itu butuh identitas orangtua juga butuh identitas. Kalaupun tidak ada ktp, dibuktikan dengan akta kelahiran dan C1 (Kartu Keluarga). Itu ternyata juga butuh diedukasi.”
  
- 4. Siapa saja yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam menerapkan program SSK?**  
“Tetap kepala sekolah, juga wakil kepala sekolah. Jadi sebelum ke guru-guru, mereka yang berembuk.”

## Transkrip Wawancara

**Informan : Kepala SMPN 1 Galur Kulon Progo, Sugeng Widadi, S.P., M.Pd.  
Si. (9 Mei 2019)**

**1. Pesan atau informasi apa yang pihak sekolah terima dari sosialisasi program SSK?**

“Dari BKKBN menyampaikan dari kegiatan SSK itu kalau bisa dimasukkan ke dalam kegiatan belajar mengajar, disisipkan disesuaikan dengan materinya. Jadi setiap mata pelajaran nanti disesuaikan dengan materi yang sedang diajarkan dengan menyisihkan isu-isu kependudukan.”

**2. Bagaimana tanggapan bapak mengenai sosialisasi program Sekolah Siaga Kependudukan yang telah dilakukan BKKBN DIY dalam menginformasikan program ini?**

“Dari sosialisasi kami jadi paham dan merasa bahwa hal ini sangat penting karena kaitannya dengan bagaimana membelajarkan khususnya kesehatan reproduksi bagi anak. Jadi memberikan pemahaman kependudukan lebih awal kepada peserta didik. Secara sisi manfaat jelas karena memberikan literasi bagi anak. Di pojok kependudukan itu ada buku-buku yang bisa dibaca, informasi-informasi yang kaitannya dengan kependudukan, kaitannya dengan kesehatan reproduksi.”

**3. Mengapa sekolah mau berpartisipasi untuk menerapkan program Sekolah Siaga Kependudukan?**

“Yang jelas menurut saya karena sangat bermanfaat bagi kami untuk memberikan pengetahuan tentang kependudukan, kesehatan reproduksi bagi anak-anak. Juga menjadi tambahan literasi untuk warga sekolah.”

**4. Siapa saja yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam menerapkan program SSK?**

“Yang jelas kepala sekolah dan dewan guru.”

## Transkrip Wawancara

**Informan : Kepala SMAN 1 Pengasih Kulon Progo, Drs. Ambar Gunawan  
(10 Mei 2019)**

**1. Pesan atau informasi apa yang pihak sekolah terima dari sosialisasi program SSK?**

“Jadi bahwa jumlah penduduk negara kita begitu padat salah satunya perlu ada pengendalian jumlah penduduk. Sektor yang dibidik diantaranya adalah pendidikan di sekolah. Sekolah itu kan sasarannya anak-anak supaya untuk tahu betul kondisi penduduk di negara pertumbuhannya begitu cepat, ke depan nanti kalau tidak ditangani dengan serius mungkin bisa jadi permasalahan-permasalahan sosial. Salah satu pengendaliannya mungkin memberikan informasi kepada anak-anak untuk menekan laju jumlah penduduk salah satunya dengan meniadakan perkawinan usia dini sehingga nanti tidak banyak yang masih usia muda, tamat SMA langsung berkeluarga.”

**2. Bagaimana tanggapan bapak mengenai sosialisasi program Sekolah Siaga Kependudukan yang telah dilakukan BKKBN DIY dalam menginformasikan program ini?**

“Sudah bagus dan itu kemudian kami teruskan kepada anak-anak. Sosialisasi terkait memberikan fasilitas pojok kependudukan. Jadi anak-anak atau juga warga sekolah lewat buku-buku yang ada itu bisa dibaca terkait bonus demografi yang akan terjadi di mana suatu puncak jumlah usia produktif begitu besar sehingga perlu dikelola dari sekarang. Jadi memang harus bekerjasama, baik dari BKKBN yang langsung menangani tapi lewat sisi sekolah juga harus membantu.”

**3. Mengapa sekolah mau berpartisipasi untuk menerapkan program Sekolah Siaga Kependudukan?**

“Ya sebenarnya kita juga membantu program pemerintah lewat BKKBN. Dan itu sebenarnya sudah masuk di dalam pembelajaran, katakanlah Geografi dan Biologi terkait dengan masalah laju pertumbuhan penduduk. Ini yang perlu disampaikan kepada anak-anak. Anak-anak juga biar tahu memang kita termasuk salah satu negara yang populasi jumlah penduduknya begitu besar sehingga perlu untuk dikelola dengan baik.”

**4. Siapa saja yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam menerapkan program SSK?**

“Ya tentu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan Guru BK.”